

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui secara empiris peran kualitas audit dalam memoderasi hubungan *corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* beserta pengaruh kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR. Variabel *tax avoidance* diukur dengan proksi *Abnormal Book-Tax Differences* (ABTD). Sampel yang diperoleh sebanyak 39 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2017-2019. Teknik analisis dalam penelitian ialah regresi linier berganda dengan bantuan *software* STATA v. 16.0.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, diantaranya :

1. Variabel kepemilikan institusional (INST) memiliki nilai signifikan sebesar $0.767 > 0,05$ dan t_{hitung} sebesar $0.30 < 1,98099$. Artinya, kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi ada atau tidaknya praktik *tax avoidance* dalam suatu perusahaan.
2. Variabel *corporate social responsibility* (CSR) memiliki nilai signifikan sebesar $0.011 < 0,05$ dan t_{hitung} sebesar $2.59 > 1,98099$. Artinya, *corporate social responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, maka *tax avoidance* juga akan semakin meningkat.
3. Kepemilikan institusional yang dimoderasi kualitas audit (INST_AQ) memiliki nilai signifikan sebesar $0.000 < 0,01$ dan t_{hitung} sebesar $4.43 > 1,65857$. Artinya, kualitas audit mampu memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa kepemilikan saham institusional mampu meminimalisir *tax avoidance*, apabila didukung oleh peran kualitas audit.

4. Pengungkapan CSR yang dimoderasi kualitas audit (CSR_AQ) memiliki nilai signifikan sebesar $0.018 < 0,05$ dan t_{hitung} sebesar $2.42 > 1,98137$. Kualitas audit dapat memperkuat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*. Hal ini membuktikan bahwa mayoritas KAP *non Big Four* dalam perusahaan mendorong pengungkapan CSR yang semakin tinggi sehingga dapat memicu perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

V.2. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka beberapa saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas dan memperdalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dengan menambahkan variabel independen lain, seperti komite audit *expertise* (Rizqia, A., & Lastiati, A., 2021 dan Apriliyana & Suryarini, 2018), koneksi politik, (Yesianda, *et al.* 2021 dan Maidina L. P. & Wati L. N., 2020), kompensasi kerugian fiskal (Mulyana, Y., *et al.*, 2020 dan Reinaldo, R., 2017) dan *transfer pricing* (Napitupulu, I. H., *et al.*, 2020 dan Amidu, M., 2019) serta menambahkan rentang periode pengamatan ataupun menggunakan sektor perusahaan lain untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih representatif.

2. Bagi Perusahaan Pertambangan

Disarankan perusahaan dapat menerapkan perilaku pembayaran pajak yang efektif dan efisien tanpa memanfaatkan celah, sehingga praktik *tax avoidance* dapat diminimalisir. Begitu pula dengan aksi yang dilakukan manajemen perusahaan, seharusnya lebih diperhatikan dan dipertimbangkan kembali serta memikirkan risiko yang akan dihadapi untuk setiap keputusan yang ditentukannya. Disamping itu, tata kelola perusahaan yang baik juga seharusnya dapat diterapkan pada setiap komponen yang terlibat dalam perusahaan sebagai salah satu upaya untuk menekan *tax avoidance*.

3. Bagi Investor

Disarankan kepada para investor untuk menelaah dan meninjau kinerja perusahaan terlebih dahulu sebelum berinvestasi untuk menghindari praktik *tax avoidance* dalam perusahaan yang dapat berdampak pada investasi di kemudian hari. Investor juga diharapkan mampu berperan untuk mengawasi aktivitas manajemen pada saat menetapkan keputusan, khususnya terkait kebijakan perpajakan.

4. Bagi Pemerintah

Pemerintah bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu bekerja sama untuk membuat sistem dan kebijakan perpajakan yang tepat khususnya mengenai praktik *tax avoidance*. Selain itu, sebagai salah satu bagian dari *stakeholders*, pemerintah dapat memberikan pengawasan yang lebih terhadap perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan terkait dengan *tax avoidance*.